

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan komponen penting dalam pembangunan nasional, pengelolaannya memerlukan berbagai sumber pendanaan dari daerah yang bersangkutan serta sejumlah kebijakan keuangan pemerintah (Rosa *et al.*, 2016). Pembangunan daerah digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat serta mengentaskan kemiskinan. Dengan demikian, untuk mencapai kesinambungan pertumbuhan nasional, pemerintah daerah harus berkontribusi dalam memprioritaskan pembangunan daerah. Mewujudkan pembangunan daerah, dikeluarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 yang menjelaskan bahwa adanya hak otonomi daerah yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah untuk mengurus sendiri urusan pemerintahannya guna kepentingan masyarakat dan pembangunan daerahnya.

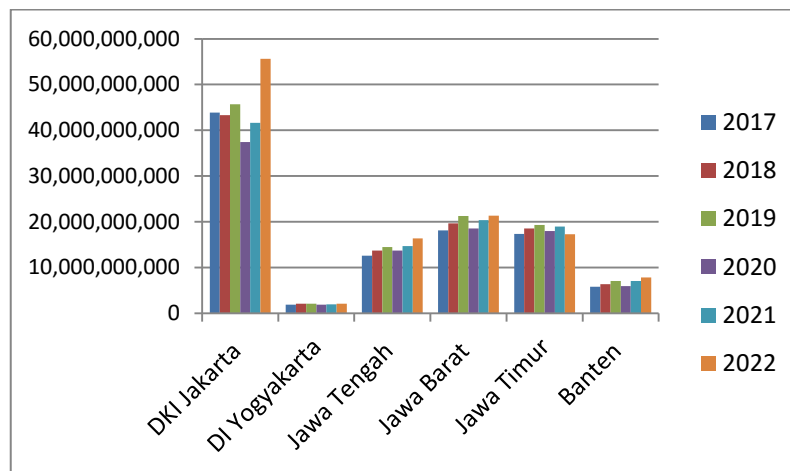
Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah seperti yang dikemukakan syamsi (1996) salah satunya yaitu kemampuan keuangan daerah pemerintah daerah harus mampu membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara keseluruhan sebagai wujud pelaksanaan, pengaturan dan pengurusan rumah tangganya sendiri (Rizkiano & Nugroho, 2008)

Kemampuan keuangan daerah menjadi faktor yang essential untuk mengukur tingkat kemampuan keuangan daerah dalam melaksanakan otonomi daerahnya, dikatakan demikian karena pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab harus didukung dengan tersedianya dana, guna untuk

pembiayaan pembangunan. Terdapat konsekuensi dalam pelaksanaan otonomi daerah yaitu tuntutan bagi pemerintah Kabupaten/Kota untuk mampu membiayai sendiri penyelenggaraan pembangunan daerah serta pembiayaan pelayanan kepada masyarakat yang menjadi kewenangannya. Hal ini menandakan bahwa daerah harus berusaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan tolak ukur keberhasilan daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah.

Sumber – sumber penerimaan daerah antara lain yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada prinsipnya, semakin tinggi sumbangan pendapatan asli daerah terhadap APBD maka semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Dengan demikian, ketika semakin kecil sumbangan pendapatan asli daerah, maka ketergantungan pemerintah daerah semakin tinggi terhadap pemerintah pusat (Hibzon, 2007).

Terdapat 3 komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan milik daerah serta pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pada gambar 1.1 menjelaskan bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Timur berada pada urutan ketiga dari 6 provinsi di Pulau Jawa. Dari tahun 2017-2022 setiap Provinsi di Pulau Jawa mengalami keadaan fluktuatif (kenaikan dan penurunan). Berdasarkan BPS, data menunjukkan bahwa di tahun tahun 2017 realisasi Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan, namun penurunan Pendapatan Asli Daerah terjadi di tahun 2020 karena terjadi pandemi covid 19, namun di tahun berikutnya 2021 – 2022 mengalami peningkatan tetapi berbeda dengan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur justru mengalami penurunan di tahun 2021 sebesar 18,935,885,925 milyar menjadi 17,239,885,634 milyar di tahun 2022.



Sumber : Badan Pusat Statistik, Data diolah

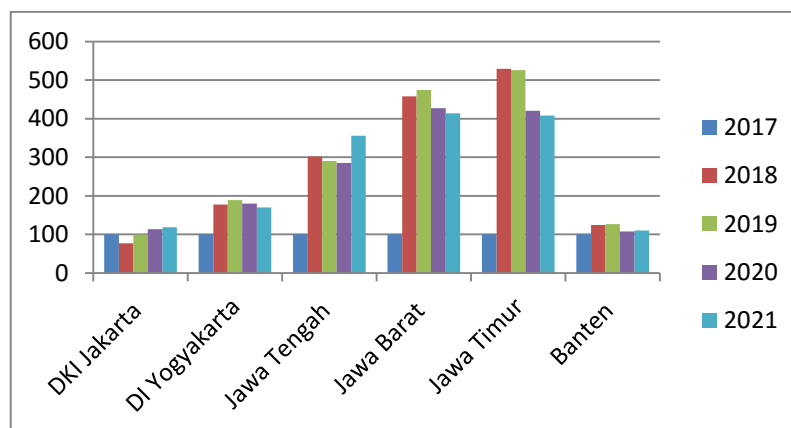
Gambar 1. 1 Realisasi PAD 6 Provinsi di Pulau Jawa, Tahun 2017-2022 (Milyar)

Salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan asli daerah adalah dengan memaksimalkan potensi yang ada, maka kreativitas sangat diperlukan untuk memaksimalkan potensi yang sudah ada dan mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat, baik itu dari pendanaan ataupun dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah. Hal ini menandakan bahwa daerah harus berusaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu dengan melalui sektor pariwisata.

Sektor Pariwisata memberikan kontribusi secara langsung pada masyarakat di sekitar daerah pariwisata, terutama dari sektor perekonomian. Secara tidak langsung, pariwisata memberikan kontribusi kepada pendapatan asli daerah (PAD) suatu daerah (Suwena & Widyatmaja, 2017). Setiap daerah untuk memilih sektor yang menjadi andalan sesuai dengan potensi yang dimiliki dan kebutuhan masyarakat, jika pariwisata menjadi sektor andalan dalam pembangunan suatu wilayah, maka wilayah tersebut harus memiliki berbagai keunikan karakteristik untuk pengembangan perekonomian (Kumala *et al.*, 2017). Pariwisata mempunyai *multiplier effect* yang bisa berdampak pada perkembangan sebuah wilayah. Pengembangan ekonomi sebuah wilayah bisa

dilakukan melalui pengembangan sektor-sektor yang memiliki potensi sebagai kegiatan produksi. Pengembangan pariwisata sebagai kegiatan produksi bisa dilakukan dengan produksi jangka panjang, yakni menambah faktor produksi seperti skala pelayanan dan jumlah objek wisata yang dikelola sehingga dalam jangka panjang akan memberikan keuntungan terhadap wilayah tersebut. Kegiatan pariwisata dalam lingkup ekonomi wilayah merupakan salah satu sektor produksi yang menyumbang pendapatan wilayah baik secara langsung maupun tidak langsung (Aji *et al.*, 2018).

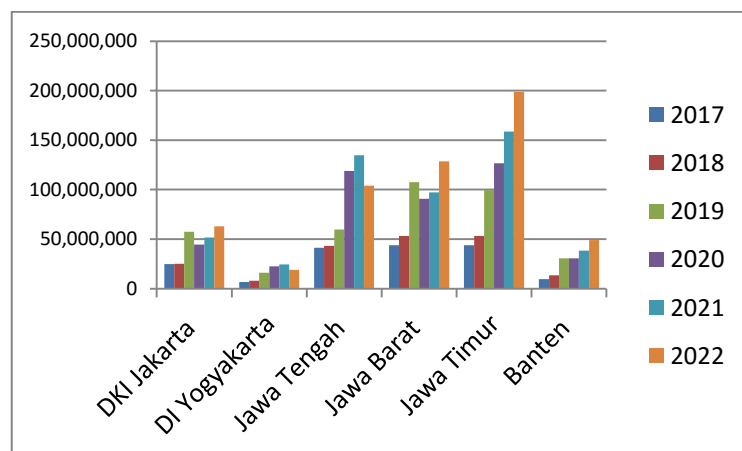
Menurut Annisa (2013), Provinsi Jawa Timur memiliki potensi objek pariwisata yang besar, pola pengembangan pariwisata Provinsi Jawa Timur berdasarkan potensi menjadi sektor pariwisata. Dorongan untuk menjadikan Provinsi Jawa Timur sebagai Kabupaten/Kota yang dapat memberikan kontribusi untuk Provinsi Jawa Timur. Pelaku industri pariwisata Provinsi Jawa Timur ternyata memandang bahwa potensi wilayah yang berada di Provinsi Jawa Timur ini belum banyak yang dieksplorasi dengan baik, selain potensi alam nilai jual yang menjadi sumber pendapatan masyarakat wilayah daerah tersebut (Kumala *et al.*, 2017).



Sumber : Badan Pusat Statistik

Gambar 1. 2 Jumlah Obyek Wisata 6 Provinsi di Pulau Jawa, Tahun 2017-2021

Potensi sumber daya alam dan budaya di Provinsi Jawa Timur tidak kalah dengan provinsi lain seperti obyek wisata yang ada (BPS, 2023). Hal ini ditunjukkan pada gambar 1.2 bahwa jumlah obyek wisata di 6 Provinsi mengalami kenaikan dan penurunan (fluktuasi). Provinsi DKI Jakarta cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya si bandingkan dengan Provinsi lainnya. Provinsi DI Yogyakarta di tahun 2017 – 2019 mengalami peningkatan namun di tahun 2020 – 2021 mengalami penurunan. Sedangkan Provinsi Jawa tengah di tahun 2017-2018 mengalami peningkatan dan di tahun 2019 – 2020 mengalami penurunan, namun di tahun berikutnya yaitu tahun 2021 mengalami peningkatan. Selanjutnya Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur sama sama memiliki obyek wisata yang beragam juga mengalami penurunan di tahun 2020 – 2021. Provinsi Banten juga mengalami penurunan di tahun 2020 dan meningkat lagi di tahun 2021. Meskipun Provinsi Jawa Timur mengalami penurunan di setiap tahun mulai 2019 – 2022 tetapi Provinsi Jawa Timur masih cenderung lebih tinggi dan unggul dibandingkan dengan Provinsi lainnya yang ada di Pulau Jawa. Hal lain juga menunjukkan bahwa dalam perjalanan wisatawan Provinsi Jawa Timur lebih unggul dibandingkan dengan Provinsi yang lain di Pulau Jawa.



Sumber : Badan Pusat Statistik

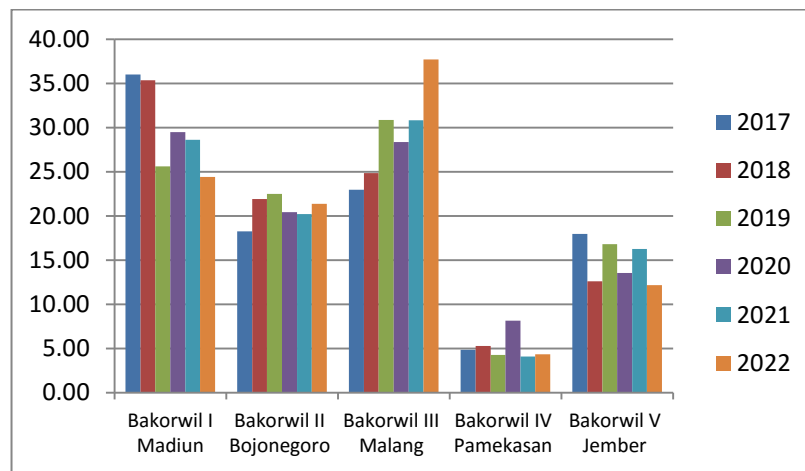
Gambar 1. 3 Jumlah Perjalanan Wisatawan 6 Provinsi Di Pulau Jawa, Tahun 2017-2022

Berdasarkan gambar 1.3 menunjukkan bahwa jumlah perjalanan wisatawan cenderung mengalami peningkatan di setiap Provinsi, namun ada beberapa Provinsi yang mengalami penurunan. Jika dilihat Provinsi Jawa Timur cenderung mengalami peningkatan dan tertinggi dibandingkan dengan Provinsi lainnya yang mengalami penurunan, seperti Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Jawa Barat di tahun 2020 mengalami penurunan. Di tahun 2022 Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah yang mengalami penurunan.

Pertumbuhan jumlah wisatawan memberikan kontribusi perekonomian suatu daerah (Asmari & Sutrisna, 2021). Pengembangan pariwisata merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam mengembangkan objek wisata sehingga menarik wisatawan untuk berkunjung (Sihombing & Hutagalung, 2021). Jumlah wisatawan sangat bergantung pada objek wisata yang akan dikunjungi dan keindahan objek wisata yang dikelola tersebut.

Jawa Timur sebagai pusat pemerintahan bagi 29 Kabupaten dan 9 Kota, yang mana Jawa Timur menjadi Provinsi di Indonesia dengan jumlah Kabupaten/Kota terbanyak. Terdapat beberapa Bakorwil (Badan Koordinasi Wilayah) Jawa Timur yang mana merupakan pembagian wilayah, yang sebelumnya bernama karesidenan. Ada lima Bakorwil yang membentuk Jawa Timur yaitu Bakorwil I Madiun, Bakorwil II Bojonegoro, Bakorwil III Malang, Bakorwil IV Pamekasan, Bakorwil V Jember (Sutanto, 2019)..

Dari kelima Bakorwil ini memiliki kapasitas daerah yang berbeda – beda dengan potensi daerah yang dimiliki (keunggulan daerah), seperti Bakorwil III Malang, dilihat dari segi objek wisata yang dimiliki.



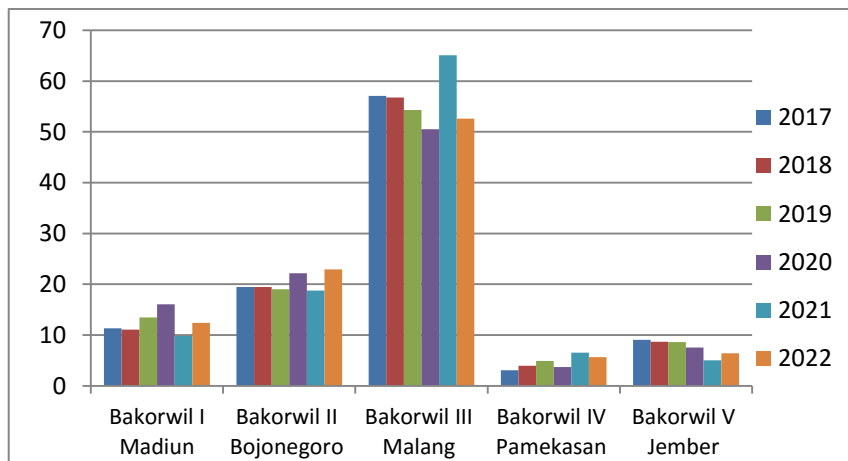
Sumber : Badan Pusat Statistik, Data Diolah

Gambar 1. 4 Persentase Jumlah Objek Wisata Setiap Kab/Kota di Bakorwil Jawa Timur, Tahun 2017-2022

Pada gambar 1.3 objek wisata di Bakorwil III Malang memiliki obyek wisata urutan kedua setelah Bakowil I Madiun, namun lebih banyak dibandingkan dengan Bakorwil II Bojonegoro, Bakorwil IV Pamekasan dan Bakorwil V Jember. Meskipun Bakorwil III Malang urutan kedua, tetapi setiap tahunnya mengalami peningkatan hanya saja di tahun 2020 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan Bakorwil I Madiun yang memang urutan pertama tetapi setiap tahunnya mengalami penurunan. Sedangkan persentase jumlah obyek wisata di Bakorwil lainnya mengalami penurunan dan peningkatan di setiap tahunnya.

Rendahnya obyek wisata bisa terjadi dikarenakan fasilitas atau akomodasi yang diperlukan wisatawan yang tidak tersedia atau kurang memadai wisatawan tidak akan terpicat untuk berkunjung. Selain itu wisatawan juga akan berkunjung ke tujuan wisata apabila objek wisata itu menarik dan banyak diminati. Selain memiliki obyek wisata yang banyak Bakorwil III Malang ini juga memiliki kunjungan wisatawan yang banyak. Kedatangan wisatawan akan memberikan pengaruh positif bagi daerah yang dikunjungi terutama pada penerimaan daerah, ketika semakin banyak wisatawan maka semakin banyak

uang yang dihabiskan atau dibelanjakan di daerah wisata. Dengan demikian kegiatan konsumtif wisatawan akan mendongkrak pendapatan asli daerah melalui sektor pariwisata disuatu daerah.



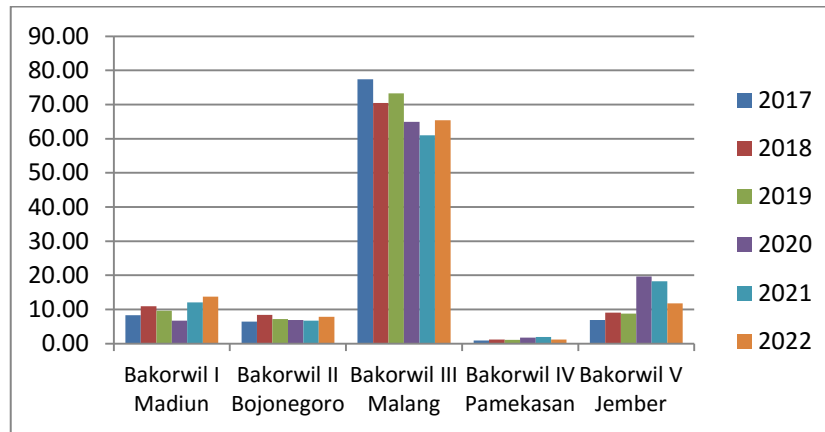
Sumber : Badan Pusat Statistik, Data diolah

Gambar 1. 5 Persentase Jumlah Wisatawan Setiap Kab/Kota di Bakorwil Jawa Timur, Tahun 2017-2022

Pada gambar 1.5 menunjukkan bahwa dalam kurun waktu enam tahun, jumlah wisatawan di beberapa Bakorwil mengalami peningkatan seperti Bakorwil I Madiun, dan Bakorwil IV Pamekasan, hanya saja di tahun 2021 Bakorwil I Madiun mengalami penurunan dan di Bakorwil IV Pamekasan mengalami penurunan di tahun 2020-2021. Sedangkan di Bakorwil II Bojonegoro, Bakorwil III Malang dan Bakorwil V Jember mengalami penurunan. Di tahun 2021 Bakorwil III Malang mengalami peningkatan, sedangkan peningkatan terjadi di Bakorwil II Bojonegoro tahun 2020 dan 2022, serta Bakorwil V Jember mengalami peningkatan hanya di tahun 2022. Meskipun demikian, Bakorwil III Malang memiliki persentase jumlah wisatawan yang tinggi dibandingkan yang lain meskipun setiap tahunnya mengalami perkembangan yang fluktuatif.

Adanya obyek wisata dan Jumlah wisatawan tidak terlepas dari adanya hotel. Hotel berfungsi bukan hanya untuk menginap tetapi bisa juga untuk

melakukan kegiatan – kegiatan bisnis, seminar ataupun hanya untuk mendapatkan ketenangan.

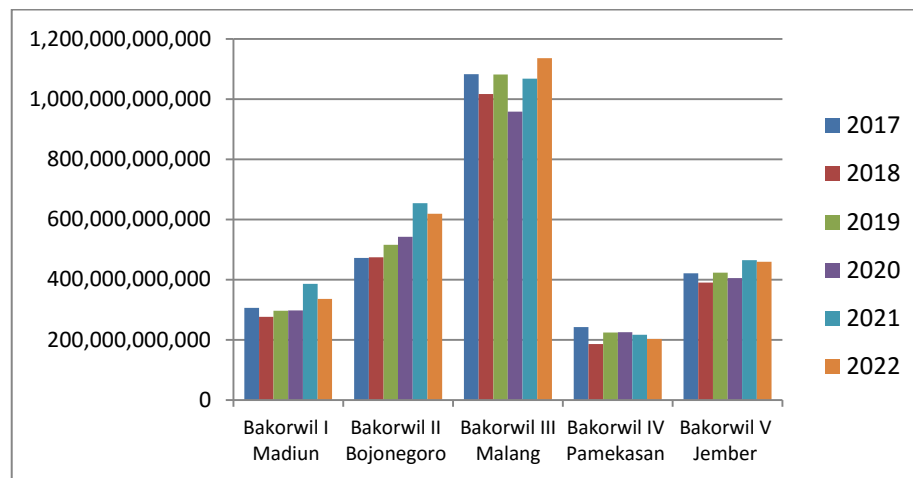


Sumber : Badan Pusat Statistik, Data Diolah

Gambar 1. 6 Persentase Jumlah Hotel Setiap Kab/Kota di Bakorwil Jawa Timur, Tahun 2017-2022

Pada gambar 1.6 diketahui bahwa dalam kurun 6 tahun terakhir, semua hotel di Bakorwil Jawa Timur mengalami keadaan yang fluktuasi. Bakorwil III Malang memiliki jumlah persentase yang paling tinggi dibandingkan dengan Bakorwil Lainnya, hanya saja di Bakorwil III Malang mengalami penurunan di setiap tahunnya, tetapi di tahun 2019 dan 2022 mengalami peningkatan.

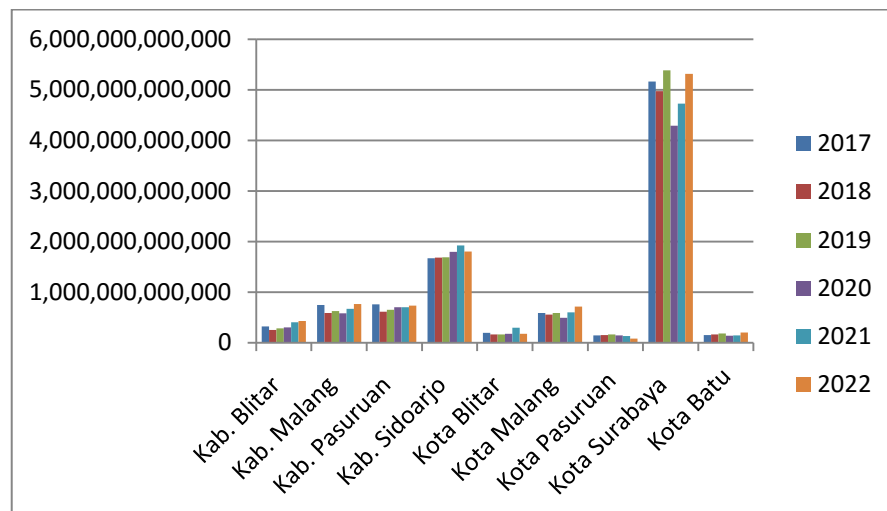
Adanya hotel tidak menutup kemungkinan untuk para wisatawan berkunjung di Bakorwil III Malang, dengan beranekaragam potensi wisata yang dimiliki sehingga bermanfaat sebagai pengenalan sektor wisata pada wisatawan yang datang ke Bakorwil III Malang dan akan meningkatkan penerimaan daerah pada sektor pariwisata. Dilihat dari gambar 1.5 persentase jumlah kunjungan wisatawan dan 1.6 jumlah hotel ketika Bakorwil III Malang mengalami penurunan menyebabkan Pendapatan Asli Daerah juga rendah, namun pada kenyataannya Pendapatan Asli Daerah di Bakorwil III Malang memiliki pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan Bakorwil lainnya meskipun dengan keadaan fluktuasi.



Sumber : DJPK Kemenkeu, Data diolah

Gambar 1. 7 PAD Kab/Kota Setiap Bakorwil di Jawa Timur, Tahun 2017-2022

Pada gambar 1.7 menjelaskan bahwa pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota pada setiap Bakorwil di Jawa Timur dari tahun 2017-2022 mengalami fluktuasi. Di tahun 2022, pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota tertinggi diduduki oleh Bakorwil III Malang dengan rata – rata penerimaan pendapatan asli daerah Rp. 1,135,813,607,727, Bakorwil II Bojonegoro menempati posisi kedua dengan rata – rata penerimaan sebesar Rp. 619,061,283,250 disusul dengan Bakorwil V Jember dengan rata – rata penerimaan sebesar Rp. 458,605,066,407, Bakorwil I Madiun dengan rata-rata penerimaan sebesar Rp. 335,505,985,880 dan yang terendah bakorwil IV Pamekasan dengan rata – rata penerimaan sebesar Rp. 202,644,453,154. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan suatu daerah bisa dilihat dari besar kecilnya kontribusinya terhadap PAD, karena PAD itu sendiri selalu dipandang sebagai indikator dalam mengukur ketergantungan pemerintahan daerah pada pemerintah pusat. Semakin besar PAD yang diterima pemerintah daerah maka semakin kecil ketergantungan pada pemerintahan pusat. Untuk melihat kondisi penerimaan PAD Kabupaten/Kota pada Bakorwil III Malang, dilihat pada gambar 1.8.



Sumber : DJPK Kemenkeu, Data diolah

Gambar 1. 8 Realisasi PAD Kab/Kota di Bakorwil III Malang, Tahun 2017-2022

Pada gambar 1.8 menjelaskan bahwa realisasi PAD di setiap Kabupaten/Kota di Bakorwil III Malang cenderung mengalami fluktuasi. Kota Surabaya menjadi Kota yang paling tinggi realisasi PAD, namun mengalami peningkatan dan penurunan, begitu juga dengan Kabupaten/Kota yang lainnya, sehingga pemerintah diharapkan mampu meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli daerah guna pembangunan ekonomi daerahnya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Arlina (2003) bahwasanya pertumbuhan sektor pariwisata dapat meningkatkan pendapatan daerah, ini karena sektor pariwisata berfungsi sebagai komponen dan harus mempertimbangkan faktor lainnya seperti obyek wisata yang ditawarkan, jumlah wisatawan terkait wisata baik domestik maupun mancanegara, jumlah hotel, restoran, hiburan, pendapatan perkapita, faktor keamanan, nilai kurs, serta investasi di industri pariwisata (Faiz *et al.*, 2017). Begitu pula dengan penelitian Akoit & Babulu (2021) bahwasannya keberhasilan pengembangan sektor pariwisata, akan meningkatkan perannya dalam penerimaan daerah, melalui faktor seperti: jumlah obyek wisata yang ditawarkan, jumlah wisatawan yang

berkunjung baik domestik maupun mancanegara, tingkat hunian hotel, restoran/rumah makan, toko souvenir dan gilirannya pada peningkatan pendapatan perkapita. Hal ini juga dibuktikan Suryani (2017) dalam penelitiannya, bahwa sarana pariwisata, objek wisata dan jumlah wisatawan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dengan hasil penelitian yaitu variabel dari jumlah objek wisata, jumlah wisatawan, dan tingkat hunian hotel menjadi faktor pengaruh pendapatan asli daerah, sedangkan pendapatan per kapita tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sehingga macam-macam variabel dari penelitian ini dapat menjadi faktor yang dapat diandalkan jika dikembangkan lebih optimal.

Akibatnya, sektor pariwisata menjadi salah satu sektor yang diandalkan bagi penerimaan daerah karena pemerintah harus bisa memanfaatkan potensi yang ada sebagai sarana untuk memperoleh dana melalui trobosan – trobosan baru dalam upaya membiayai pengeluaran daerah. Manfaat yang paling menonjol yaitu kualitas dan obyek-obyek wisata yang baru. Hal ini akan meningkatnya jumlah wisatawan baik dari nusantara ataupun mancanegara, sehingga akan penerimaan daerah akan meningkat, selain itu meningkatkan perekonomian masyarakat, memperluas dan pemeratakan lapangan kerja dan memperoleh pendapatan asli daerah yang optimal. Maka dari itu, perlu upaya untuk meningkatkan pariwisatanya dengan cara memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah. Maka dari itu, penelitian ini difokuskan pada **“Analisis Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Barkowil III Malang”**. Banyaknya potensi wisata yang dikelola di setiap Kabupaten/Kota, menjadi daya tarik tersendiri dalam penelitian ini.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

Bagaimana pengaruh jumlah obyek wisata, jumlah kunjungan wisata, jumlah hotel, jumlah restoran dan PDRB terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Bakorwil III Malang ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

Menganalisa seberapa besar pengaruh jumlah obyek wisata, jumlah kunjungan wisatawan, jumlah hotel, jumlah restoran dan PDRB terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Barkorwil III Malang ?

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat anatara lain sebagai berikut :

1. Manfaat secara teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan terkait ilmu ekonomi, khususnya terkait kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Bakorwil III Malang.

2. Manfaat secara praktis

a) Bagi pemerintah

Penelitian ini dapat digunakan sebagai evaluasi kebijakan dan pembentukan mengenai program program yang tepat sehingga mampu meningkatkan dan mengembangkan sektor pariwisata Kabupaten/Kota di Bakorwil III Malang.

b) Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih tentang ilmu ekonomi dan pengetahuan di sektor pariwisata, yakni mengenai kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Bakorwil III Malang.